

KATALOG : 3206001.1217

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK
KABUPATEN SAMOSIR**

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMOSIR**

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK
KABUPATEN SAMOSIR**

2016

<https://samosirkab.bps.go.id>



ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016

ISBN : 978.602.6860.35.4

Katalog : 3206001.1217

No. Publikasi : 1217.1715

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah halaman : xii + 103 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Penyunting Naskah :

Seksi Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Gambar Sampul :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Diterbitkan Oleh :

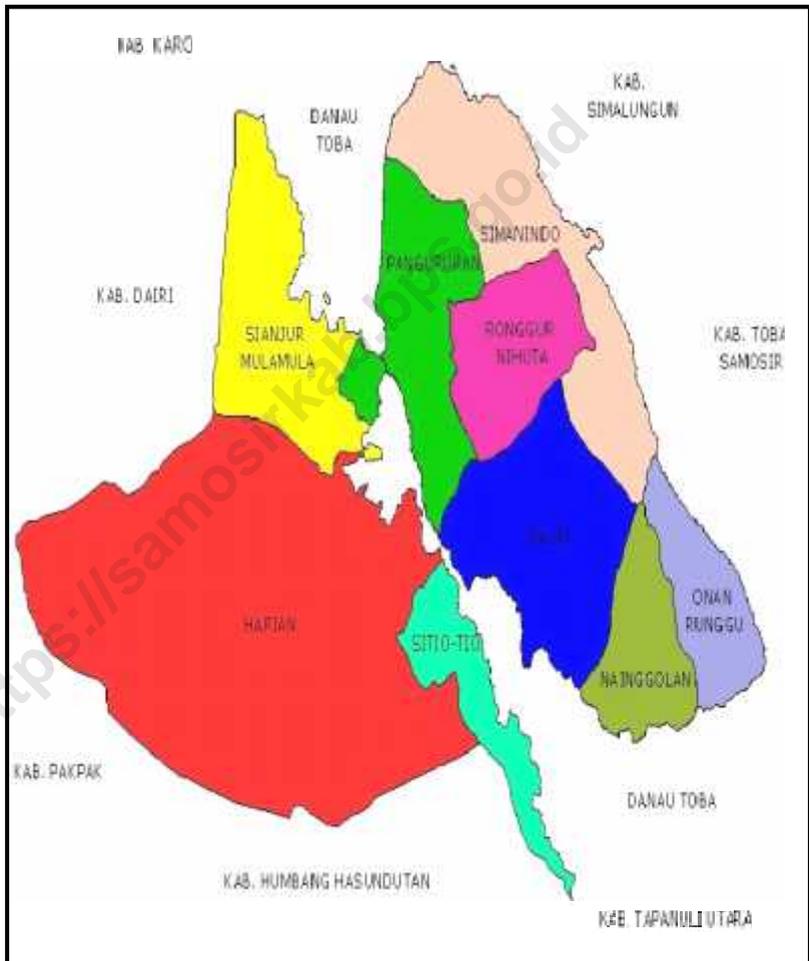
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Dicetak Oleh :

CV. Rilis Grafika

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagai atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

PETA WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir telah menyelesaikan publikasi **“Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2016”** tepat waktu.

Publikasi ini memuat gambaran tentang distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016 serta perkembangannya sejak tahun 2012, yang dianalisis secara sederhana dengan menggunakan ukuran *Gini Ratio*, dampak kebijaksanaan pembangunan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Samosir, serta peningkatan pendapatan penduduk sebagai hasil pembangunan telah dinikmati oleh masyarakat secara relatif merata..

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan di masa mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi kebutuhan akan data statistik, baik untuk instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Pangururan, November 2017
BPS Kabupaten Samosir
Kepala,

Ir. Rudy Harlon Harianja

DAFTAR ISI

PETA WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sumber Data	6
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN	11
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan	11
2.2 Uraian Distribusi Pendapatan	13
2.2.1 Kurva Lorenz	15
2.2.2 Koefisien Gini (<i>Gini Ratio</i>)	17
2.3 PDRB Per Kapita	19
2.4 Pengeluaran Per Kapita	21
2.5 Kemiskinan dan Pengukurannya	23
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR	
TAHUN 2016	33
3.1 Gambaran Umum Wilayah dan Administratif	33
3.1.1 Letak dan Geografis	33
3.1.2 Wilayah Administrasi	34
3.2 Kependudukan	36
3.2.1 Jumlah Penduduk dan Penyebarannya	37

3.2.2	Struktur Umur Penduduk.....	40
3.2.3	Pendidikan.....	46
3.3	Struktur Ekonomi	48
3.3.1	PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi..	48
3.3.2	Struktur Perekonomian Makro.....	52
3.3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	53
3.4	Kesejahteraan Rakyat	56
3.4.1	PDRB Per Kapita.....	56
3.4.2	Pengeluaran Per Kapita dan Pola Konsumsi.....	59
3.4.3	Tingkat Kemiskinan.....	65
BAB IV	DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	71
4.1	Tingkat Pendapatan.....	71
4.2	Ukuran Gini Ratio	79
4.3	Analisis Kriteria Bank Dunia	82
BAB V	PENUTUP	89
5.1.	Kesimpulan.....	89
5.2.	Saran.....	93
	LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan.....	35
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Samsir 2012 – 2016.....	37
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan 2016.....	38
Tabel 3.4	Persentase Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2016	40
Tabel 3.5	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin 2016.....	42
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur 2012-2016.....	44
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur 2012 – 2016.....	45
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin 2016.....	47
Tabel 3.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samsir 2012 – 2016.....	49
Tabel 3.10	Nilai PDRB Kabupaten Samsir 2016	51
Tabel 3.11	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samsir 2016 (Persen)	54
Tabel 3.12	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Samsir Menurut Sektor 2012-2016 (Persen).....	58

Tabel 3.13	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan 2012 -2016.....	61
Tabel 3.14	Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Golongan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2015-2016.....	64
Tabel 3.15	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Samosir 2012-2016.....	66
Tabel 4.1	Persentase Penduduk dan Persentase Pengeluaran Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Samosir 2016 (Persen)	73
Tabel 4.2	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara 2016 (Persen)	74
Tabel 4.3	Angka Gini Ratio Kabupaten Samosir 2012-2016 (Persen)	78
Tabel 4.4	Gini Ratio Dan Kriteria Ketimpangan Kabupaten Samosir 2012-2016	80
Tabel 4.5	Proporsi Pendapatan yang Diterima oleh Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan Di Kabupaten Samosir 2014-2016.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambarl 2.1.	Kurva Lorenz.....	16
Gambarl 2.2.	Ilustrasi Penentuan Penduduk Miskin Menggunakan Garis Kemiskinan.....	27
Gambarl 3.1.	Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kecamatan.....	35
Gambarl 3.2	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Samsir 2012 – 2016.....	46
Gambarl 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samsir 2012-2016.....	55
Gambarl 3.4	Perkembangan PDRB Per Kapita Penduduk Terhadap ADHK Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Samsir 2012-2016.....	59
Gambarl 3.5	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan 2012-2016.....	60
Gambarl 3.6	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan 2012-2016.....	62
Gambarl 4.1	Kurva Lorenz.....	76
Gambarl 4.2	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Samsir 2012-2016.....	81
Gambarl 4.3	Persentase Pendapatan Yang Diterima Menurut Kelompok Penduduk Di Kabupaten Samsir 2016.....	85

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://samosir.kab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan pembagian pendapatan dan kemiskinan merupakan dua masalah yang selalu muncul bersama-sama dalam perkembangan suatu masyarakat. Peranan data dan informasi statistik untuk mendukung pembangunan dalam era otonomi daerah sekarang ini adalah semakin penting dan strategis, baik sebagai instrumen dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat melalui perencanaan pembangunan, maupun dalam evaluasi capaian pembangunan yang lebih terukur. Oleh sebab itu tuntutan akan ketersediaan data dan informasi statistik, baik oleh pemerintah daerah maupun kalangan pengguna data lainnya, dirasakan semakin meningkat dan beragam. Bahkan akhir-akhir ini data statistik juga sering digunakan sebagai alat untuk klarifikasi dan legitimasi bagi keberhasilan atau kegagalan suatu proses pembangunan baik nasional maupun daerah.

Di berbagai negara dan daerah, indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk yang umum digunakan hingga saat ini adalah Indeks Gini atau *Gini Ratio* dan ukuran tingkat Kemerataan Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia, selain ukuran pertumbuhan pendapatan

penduduk ataupun ukuran-ukuran lainnya. Indikator ini memberikan gambaran sampai sejauh mana peningkatan pendapatan penduduk dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas dan merata secara terukur, sehingga strategi dan kebijakan pembangunan dalam upaya peningkatan pendapatan yang semakin merata dan pemerataan pendapatan yang semakin meningkat dapat dipantau secara berkala.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah telah menetapkan Gini Ratio dan Ukuran Kemerataan Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia sebagai ukuran tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk menjadi salah satu Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan statistik Gini Ratio dan Ukuran Kemerataan Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia di daerah hingga saat ini lebih banyak diupayakan oleh masing-masing pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik di daerah setempat, sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9

Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan statistik Gini Ratio dan Ukuran Kemerataan Pendapatan Penduduk Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Samosir, telah dilakukan upaya untuk menyediakan data dan informasi tersebut melalui kegiatan penyusunan publikasi Gini Ratio 2016, yang memuat data dan analisis statistik Distribusi Pendapatan penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2012 hingga tahun 2016.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang :

- a) Untuk mengetahui kondisi umum sosial ekonomi penduduk Kabupaten Samosir.
- b) Untuk mengetahui perkembangan tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Samosir.
- c) Untuk mengetahui perkembangan pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Samosir.
- d) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menentukan strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

1.3 Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penghitungan Indeks Gini dan Tingkat Pemerataan Pendapatan Kriteria Bank Dunia dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu :

- a) Persentase jumlah penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan pengeluaran, dan
- b) Persentase jumlah pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan pengeluaran per kapita per sebulan.

Di samping itu, untuk melengkapi pembahasan dalam publikasi ini digunakan juga beberapa data lain yang penting, seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, rata-rata dan persentase pengeluaran per kapita per bulan menurut jenis konsumsi, jumlah penduduk, kemiskinan, serta data lain yang berhubungan dengan analisis.

1.4 Ruang Lingkup

Karena keterbatasan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data PDRB yang belum tersedia hingga tingkat kecamatan, maka tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Samosir yang disajikan dalam

publikasi ini terbatas hanya pada tingkat kabupaten tanpa perbandingan antar kecamatan maupun antar desa perkotaan dan pedesaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

- a) **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan publikasi, maksud dan tujuan, sumber data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- b) **Bab II Uraian**, memuat tentang uraian pertumbuhan ekonomi vs distribusi pendapatan, uraian tentang disribusi pendapatan, yaitu Kurva Lorenz, koefisien Gini, kriteria Bank Dunia, PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, serta uraian tentang kemiskinan dan pengukurannya.
- c) **Bab III Gambaran Umum Kabupaten Samosir**, memuat uraian tentang kondisi umum wilayah dan geografis, kondisi umum kependudukan, kondisi umum perekonomian makro daerah, dan kondisi umum kesejahteraan rakyat.
- d) **Bab IV Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir**, memuat uraian tentang distribusi pendapatan

penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016 serta perkembangannya sejak tahun 2012, yang dianalisis secara sederhana menggunakan ukuran Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia.

- e) **Bab V Penutup**, memuat kesimpulan tentang perhitungan dan analisis distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir.

BAB 2

URAIAN

<https://samosir.kab.bps.go.id>

BAB II

URAIAN

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan

Tujuan akhir dari pembangunan di suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan regional atau nasional, karena secara teori ekonomi diketahui bahwa dengan adanya kenaikan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan pajak dan tabungan secara berarti. Itulah sebabnya penekanan kenaikan pendapatan sebagai tujuan strategis pembangunan ekonomi di berbagai wilayah cukup beralasan.

Strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang tinggi memerlukan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum, namun strategi pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi kepada laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum adalah tidak cukup, karena berdasarkan penelitian para ahli di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta merta dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas melainkan hanya menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu dan menimbulkan kemiskinan absolut dan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakat. Dengan kata

lain strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi yang maksimum tersebut justru menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk.

Berdasarkan hal tersebut strategi pembangunan yang lebih baik untuk tujuan pembangunan itu sendiri sebenarnya adalah strategi pembangunan yang tidak perlu mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, karena akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan untuk menghilangkan kemiskinan secara realistis. Pilihannya adalah dengan penekanan kepada tipe pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, sehingga manfaat pembangunan yang dinikmati oleh orang-orang yang kaya dapat didistribusikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi.

Dengan strategi pembangunan yang lebih baik ini maka tujuan pembangunan akan dapat menciptakan pola pertumbuhan pendapatan yang diinginkan dengan penekanan khusus pada akselerasi pertumbuhan pendapatan golongan miskin. Tentu saja hal ini memerlukan strategi yang berbeda dengan strategi yang hanya berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi yang maksimum yang tidak mempertimbangkan akibatnya terhadap distribusi pendapatan penduduk.

Untuk hal tersebut maka ukuran keberhasilan pembangunan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum tidak semata-mata hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan penduduk namun harus dapat diukur apakah peningkatan pendapatan tersebut telah merata dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas atau tidak, sehingga apa yang disebut dengan upaya peningkatan pendapatan yang semakin merata dan pemerataan pendapatan yang semakin meningkat dapat diwujudkan.

Pertumbuhan pendapatan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari ukuran pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk, sementara pemerataan pendapatan penduduk dapat dilihat dari distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut.

2.2. Ukuran Distribusi Pendapatan

Pada umumnya para ahli ekonomi membedakan antara dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk tujuan kuantitatif dan analisis, yaitu Distribusi Pendapatan "Perorangan" atau Distribusi Ukuran dan Distribusi Pendapatan "Fungsional" atau Distribusi Pendapatan berdasarkan peranan masing-masing faktor-faktor yang bisa didistribusikan (*distributive factor share*), namun Distribusi Pendapatan "Perorangan" atau Distribusi Ukuran adalah yang paling banyak digunakan. Distribusi Pendapatan

”berdasarkan peranan masing-masing faktor-faktor yang bisa didistribusikan” (*distributive factor share*) tidak diuraikan dalam publikasi ini.

Distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Dalam konsep ini cara yang dilakukan oleh keluarga atau perorangan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, berapa besar masing-masing individu atau rumah tangga menerimanya, apakah pendapatan tersebut berasal dari bekerja atau dari sumber lainnya seperti, bunga, keuntungan, hadiah atau warisan, tidak dipersoalkan. Selanjutnya, tempat (kota atau desa) dan sektor sumber penerimaan tersebut apakah industri, perdagangan, jasa dan lain-lain juga diabaikan.

Beberapa teori maupun ukuran yang dikenal tentang Distribusi Pendapatan ”Perorangan” atau Distribusi Ukuran adalah Kurva Lorenz, Koefisien Gini (Gini Rasio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil, Indeks-L, dan rasio Q5/Q1, Indeks Pareto, Teori Gibrat, Indeks Kuznets, dan Indeks Oshima, namun Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir dalam publikasi ini hanya menggunakan dua ukuran, yaitu ukuran Gini Rasio yang didasarkan pada Kurva Lorenz, dan kriteria Bank Dunia, kedua ukuran ini merupakan yang paling umum digunakan oleh para ekonom untuk melihat distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah.

2.2.1. Kurva Lorenz

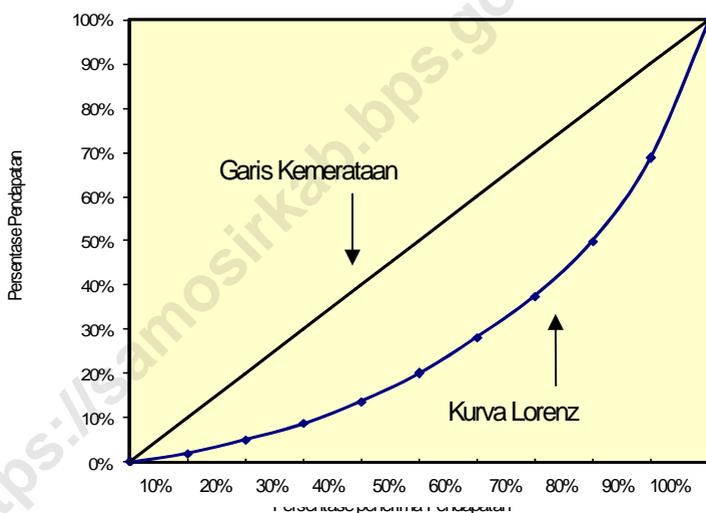
Ukuran ini digunakan untuk mengetahui rasio ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama waktu tertentu, misalnya satu tahun, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1.

Dalam kurva Lorenz jumlah penerima pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada sumbu horizontal yang berakhir dengan 100 persen dan persentase dari pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut dinyatakan dalam sumbu vertikal yang juga berakhir dengan 100 persen, sehingga panjang kedua sumbu tersebut sama dan gambar keseluruhan merupakan segi empat.

Garis diagonal dari titik nol sudut kiri bawah ke sudut kanan atas merupakan tempat kedudukan persentase pendapatan yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Titik tengah garis diagonal menunjukkan 50 persen dari pendapatan didistribusikan persis untuk 50 persen dari jumlah penduduk, titik yang terletak pada $\frac{3}{4}$ panjang

diagonal menunjukkan 75 persen dari pendapatan didistribusikan pada 75 persen jumlah penduduk. Dengan kata lain garis diagonal merupakan garis "kemerataan sempurna" dalam ukuran distribusi pendapatan.

Gambar 2.1
Kurva Lorenz



Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna) tingkat ketidakmerataan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat ketidakmerataan maka kurva Lorenz akan semakin melengkung mendekati garis horizontal. Oleh karena tidak ada satu wilayah atau negara pun yang memperlihatkan kemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusii pendapatan

penduduknya, maka kurva Lorenz dari setiap wilayah atau negara akan berada di sebelah kanan garis diagonal.

2.2.2. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Gini ratio adalah ukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif yang sangat sederhana, yang didasarkan pada kurva Lorenz. Secara grafik, pengukuran ketidakmerataan pendapatan diperoleh dengan cara menghitung rasio luas bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dengan luas separuh luas bidang di mana kurva terletak, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1. Rasio ini dikenal sebagai "Rasio Konsentrasi Gini" (*Gini Concentration Ratio*) atau lebih sederhana disebut Koefisien Gini atau Gini Rasio, yang diambil dari nama seorang ahli statistik Italia, C. Gini yaitu orang yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

Gini Rasio merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya dapat bervariasi antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna).

$$\text{Koefisien Gini} = \frac{\text{Luas bidang A}}{\text{Luas bidang BCD}}$$

Secara matematis, Gini Rasio dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana :

GR = Koefisien Gini (Gini Rasio)

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan rumah tangga sampai dengan kelas ke-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan rumah tangga sampai dengan kelas ke-(i-1)

n = Banyaknya kelas pendapatan

Hera Susanti dkk, dalam buku Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI,1995, membuat kriteria Gini Rasio sebagai berikut :

- Jika Gini Rasio < 0,4, maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan rendah,
- Jika 0,4 Gini Rasio 0,5 maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan sedang (Moderat)
- Jika Gini Rasio > 0,5 maka ketimpangan dalam distribusi pendapatan dikategorikan tinggi.

Menurut Michael P. Todaro - Buhanuddin Abdullah, dalam buku Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, edisi ketiga jilid 1, Erlangga, 1993, Gini Ratio dari negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat tidak merata umumnya terletak diantara 0,50 dan 0,70, sedangkan Gini Rasio dari negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata terletak diantara 0,20 dan 0,35.

Namun demikian, Gini Ratio hanyalah suatu indikator yang mengukur tingkat pemerataan pendapatan secara umum, namun tidak bisa menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok bawah (miskin) dengan kelompok atas (kaya) yang justru sangat diperlukan dalam perencanaan maupun strategi pembangunan untuk mengatasi ketidak merataan atau ketimpangan pendapatan itu sendiri, serta untuk mengatasai tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu para ahli menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain, sehingga lahirlah ukuran distribusi pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia.

2.3. PDRB Per Kapita

Hingga kini data pendapatan perkapita masing-masing daerah di Indonesia umumnya didekati melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang merupakan rata-rata besaran nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing penduduk suatu wilayah akibat adanya

aktifitas produksi. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap merata), atau dengan rumus :

$$PDRB_{perkapita} = \frac{PDRB_{ADH \text{ berlaku}/ADH \text{ konstan}}}{Penduduk \text{ Pertengahan tahun}}$$

Oleh karena itu besarnya PDRB perkapita sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan ekonomi (PDRB) dan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Wilayah yang mempunyai nilai PDRB yang tinggi belum tentu memiliki PDRB perkapita yang tinggi apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat besar.

Pendapatan perkapita yang digambarkan oleh data PDRB perkapita suatu wilayah sesungguhnya bukanlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing setiap penduduk namun gambaran ini merupakan ukuran rata-rata yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perkapita secara regional dari wilayah tersebut. Pada umumnya apabila data PDRB perkapita suatu wilayah disajikan secara berkala maka perubahan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut akan dapat diketahui. Meskipun ukuran ini tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara riil akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran rata-rata

tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara regional.

2.4. Pengeluaran Per Kapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk adalah data pengeluaran rata-rata perkapita penduduk sebulan, penghitungannya didasarkan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun.

Yang dimaksud dengan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan dari seluruh anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga, tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas hanya pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pada umumnya semakin tinggi pendapatan penduduk maka tingkat rata-rata pengeluaran penduduk pun akan semakin tinggi. Perubahan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah sebagai akibat meningkatnya pendapatan dapat diketahui dari perkembangan perubahan proporsi pengeluaran

penduduk untuk konsumsi makanan dan non makanan dari daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan umumnya semakin turun karena peningkatan pendapatannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau bahkan ditabung.

Pada umumnya perhitungan dan analisis distribusi pendapatan penduduk di Indonesia adalah menggunakan data jumlah penduduk atau persentase penduduk dan jumlah pengeluaran penduduk per bulan atau persentase rata-rata pengeluaran penduduk per bulan terhadap total pengeluaran penduduk per bulan, menurut golongan pengeluaran baik pengeluaran untuk konsumsi makanan maupun pengeluaran untuk bukan makanan sebagai pendekatan (*proxy*) terhadap data pendapatan penduduk per bulan.

Oleh karena itu distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir yang disajikan dalam publikasi ini perhitungannya didasarkan pada data persentase penduduk dan persentase rata-rata pengeluaran penduduk per bulan terhadap total pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir per bulan menurut golongan pengeluaran.

2.5. Kemiskinan dan Pengukurannya

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain, terpenuhinya :

- Kebutuhan pangan
- Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

Menurut jenisnya kemiskinan dapat dilihat dari dua bentuk sebagaimana sering dilakukan dalam analisis kemiskinan suatu wilayah, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Analisis ukuran kemiskinan suatu wilayah berdasarkan kedua jenis ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk. Dalam kemiskinan relatif, fokus pengamatan pada dasarnya lebih ditekankan kepada ukuran sejauh mana kebijakan pembangunan suatu wilayah mampu memberikan

kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sehingga jurang antara si kaya dan si miskin semakin kecil.

Indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan relatif dalam suatu wilayah adalah tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan/pengeluaran dalam pendapatan/pengeluaran antar golongan penduduk dalam suatu wilayah melalui berbagai ukuran, seperti median/rata-rata pendapatan yang digunakan di Uni Eropah, Gini ratio, ukuran Bank Dunia, indeks Theil, dan lain-lain.

Namun ukuran kemiskinan relatif yang sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran antar golongan penduduk dalam suatu wilayah tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara/wilayah dan antar waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*basic needs*) seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum ini merupakan ukuran finansial yang dikonversikan dalam bentuk mata uang dan nilainya disebut sebagai batas garis kemiskinan.

”Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan

/pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan akan digolongkan sebagai penduduk miskin”.

Karena garis kemiskinan absolut adalah tetap (tidak berubah) dalam ukuran standar hidup yang dinilai secara finansial maka kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum antar wilayah dan antar waktu apabila menggunakan garis kemiskinan absolut yang sama.

Bank Dunia dalam menghitung kemiskinan absolut menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk yang dikonversi ke dalam US \$ PPP (*Purchasing Parity Power*) yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Misalnya untuk Indonesia angka konversi US \$ PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di mana jumlah barang dan jasa yang sama tersebut dapat dibeli seharga US \$ 1 di Amerika.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan ini juga digunakan oleh negara-negara lain seperti : Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Melalui pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS, dari sisi ekonomi ***”Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan***

maupun non makanan yang diukur dengan menggunakan indikator garis kemiskinan”.

Oleh karena itu Garis kemiskinan (GK) yang dibuat oleh BPS terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}.....(\text{Gambar 2.2})$$

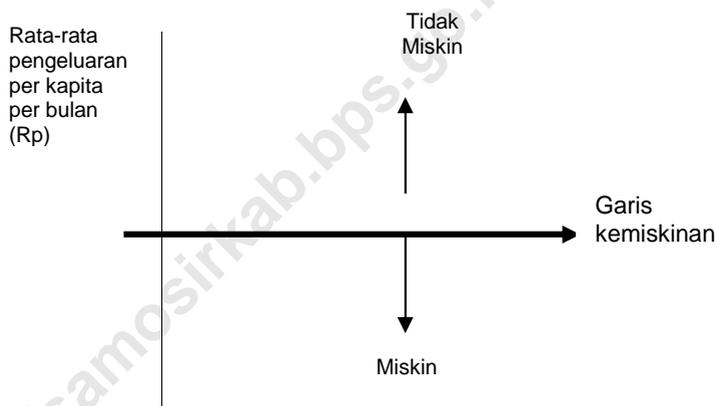
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan suatu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, untuk Indonesia nilai ini mengacu pada patokan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, yaitu 2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah suatu nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penduduk miskin di Indonesia menurut BPS adalah apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan (rupiah) penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun non makanan berada atau di bawah garis Kemiskinan (GK).

Perubahan jumlah penduduk miskin secara absolut selain dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang lain, juga dipengaruhi oleh sensitifitas terhadap perubahan tingkat harga-harga kebutuhan dasar sehari-hari yang akan

mengakibatkan perubahan terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Gambar 2.2
Ilustrasi Penentuan Penduduk Miskin
Menggunakan Garis Kemiskinan



Apabila harga-harga kebutuhan dasar di suatu daerah mengalami kenaikan yang signifikan tanpa diikuti oleh adanya tingkat kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dari kenaikan harga-harga tersebut maka garis kemiskinan daerah tersebut akan semakin meningkat dan jika garis kemiskinan meningkat maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Itulah sebabnya dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan absolut, strategi utama yang akan dan sedang ditempuh oleh pemerintah adalah

meningkatkan pendapatan penduduk, dan menurunkan beban hidup penduduk.

Selain ukuran jumlah kemiskinan absolut, ada tiga indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagaimana dirumuskan oleh **Foster-Greer-Thorbecke** tahun 1984, yaitu :

- i) *Head Count Index*-(P_0), merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,
- ii) *Poverty gap Index* (P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks P_1 semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan
- iii) *Poverty Severity Index* (P_2), merupakan ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, indeks ini dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks P_2 semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing indeks tersebut adalah sebagai berikut :

$$P_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^r \dots\dots\dots (2.5)$$

dimana :

$r = 0,1,2$

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

($i = 1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

<https://samosir.kab.go.id>

BAB 3

**GAMBARAN
UMUM**

<https://samosir.kab.bps.go.id>

BAB III

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016

3.1 Gambaran Umum Wilayah dan Administratif

3.1.1 Letak dan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Samosir mencapai 1.444,25 km², yaitu seluruh daratan Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba ditambah sebagian daratan Pulau Sumatera (bukit barisan). Kabupaten Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, yang terbentuk melalui Undang-Undang nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 2^o21'38'' - 2^o49'48'' Lintang Utara dan di antara 98^o24'00'' - 99^o01'48'' Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Toba Samosir. Topografi wilayah kabupaten ini pada umumnya berbukit-bukit dan bergelombang hingga pengunungan dengan ketinggian wilayah antara 904 - 2.157 m di atas permukaan laut, sehingga mengakibatkan 58 persen desa dari seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah ini letaknya berada di lereng pegunungan, 12 persen berada di lembah/daerah aliran sungai, dan hanya 30 persen yang berada di daerah dataran (Survei Potensi Desa 2011). Struktur tanahnya labil dan berada pada jalur gempa tektonik dan vulkanik.

3.1.2 Wilayah Administrasi

Pada tahun 2016 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan. Adapun luas wilayah menurut masing-masing kecamatan adalah, Kecamatan Harian 560,45 km² (38,81 persen), Simanindo 198,20 km² (13,72 persen), Sianjur Mulamula 140,24 km² (9,71 persen), Palipi 129,55 km² (8,97 persen), Ronggurnihuta 94,87 km² (6,57 persen), Pangurusan 121,43 km² (8,41 persen), Nainggolan 87,86 km² (6,08 persen), Onanrunggu 60,89 km² (4,22 persen), dan Sitiotio 50,76 km² (3,51 persen).

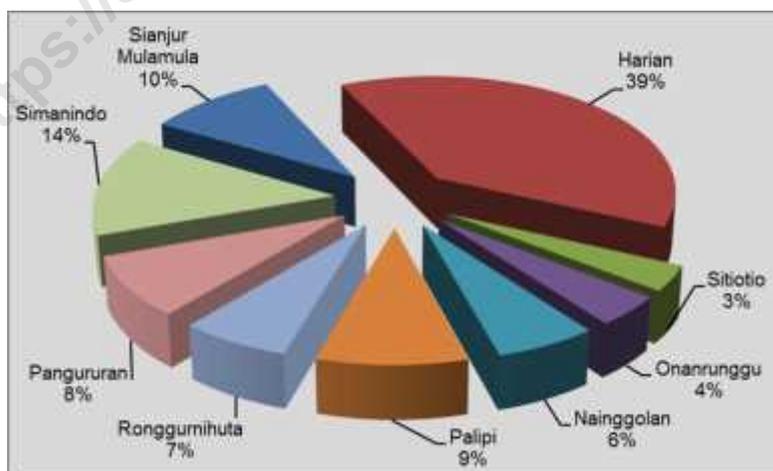
Nama-nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan menurut masing-masing kecamatan adalah seperti tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
2016

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sianjur Mulamula	12	-	12
2.	Harian	13	-	13
3.	Sitiotio	8	-	8
4.	Onanrunggu	12	-	12
5.	Nainggolan	13	2	15
6.	Palipi	17	-	17
7.	Ronggurnihuta	8	-	8
8.	Pangururan	25	3	28
9.	Simanindo	20	1	21
Kabupaten Samosir		128	6	134

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2016

Gambar 3.1
Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kabupaten Samosir

3.2 Kependudukan

Kependudukan merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Penduduk tidak saja mencakup jumlah, namun termasuk juga komposisi dan distribusinya. Jumlah penduduk yang besar dan kurang seimbang dengan daya dukungan dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu sasaran pembangunan kependudukan adalah meningkatkan kualitas penduduk dan termasuk penyebaranguna mewujudkan masyarakat yang sejahtera maju dan mandiri.

Upaya meningkatkan kualitas penduduk tersebut sangatlah berkaitan dengan penyebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya di suatu wilayah. Perkembangan penduduk mencakup jumlah, komposisi serta distribusinya serta mobilitas antar daerah. Oleh karenanya keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi pertimbangan guna tercapainya masyarakat yang sejahtera.

3.2.1 Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah 124.496 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 61.904 jiwa dan perempuan sebanyak 62.592 jiwa, dan 30.007 rumah rumah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2012-2016 adalah 3,76 persen.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Samosir 2012 - 2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)
2012	121 613	84,20
2013	122 449	84,78
2014	123 065	85,21
2015	123 789	85,71
2016	124 496	86,20

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Secara umum jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Samosir hampir berimbang, hal ini ditunjukkan oleh angka rasio jenis kelamin, yaitu sebesar 98,90, yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata hampir 99 penduduk laki-laki.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah	Rasio	Jumlah
		Laki-laki	Perem- puan		Jenis Kelamin (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sianjur Mulamula	4 797	4 704	9 501	101,96	2 404
2.	Harian	4 031	4 127	8 158	97,66	1 945
3.	Sitiotio	3 683	3 693	7 376	99,75	1 815
4.	Onanrunggu	6 079	5 442	10 748	97,51	2 756
5.	Nainggolan	5 998	6 253	12 332	97,23	3 066
6.	Palipi	8 309	8 435	16 744	98,50	3 938
7.	Ronggurnihuta	4 296	4 384	8 680	97,98	2 031
8.	Pangururan	15 317	15 331	30 648	99,09	6 982
9.	Simanindo	10 086	10 223	20 309	98,67	5 070
	Kab.Samosir	61 904	62 592	124 496	98,90	30 007

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Menurut kecamatan, Kecamatan Sianjur Mulamula merupakan satu-satunya kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin di atas 100 persen, yaitu 101,96 persen, hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara delapan kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen, yang mempunyai

arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Hingga tahun 2016 penyebaran penduduk Kabupaten Samosir menurut wilayah kecamatan relatif belum merata, hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk menurut kecamatan, dimana sebanyak 40,93 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir hanya berada di dua kecamatan, yaitu Pangururan dan Simanindo, sedangkan 59,07 persen berada di tujuh kecamatan yang lain, yaitu Sianjur Mulamula, Harian, Siotio, Onanrunngu, Nainggolan, Palipi, dan Ronggur Nihuta.

Demikian juga dengan kepadatan penduduk, angka kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pangururan sebagai ibukota kabupaten, yaitu mencapai 252,39 jiwa/km², dan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Harian, yaitu hanya 14,56 jiwa/km².

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai,

khususnya di Kecamatan Pangururan sebagai ibu kota kabupaten.

Tabel 3.4
 Persentase Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
 Menurut Kecamatan 2016

No.	Kecamatan	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sianjur Mulamula	7,63	67,75
2.	Harian	6,55	14,56
3.	Sitiotio	5,92	145,31
4.	Onanrunggu	8,63	176,52
5.	Nainggolan	9,90	140,36
6.	Palipi	13,44	129,25
7.	Ronggurnihuta	6,97	91,49
8.	Pangururan	24,61	252,39
9.	Simanindo	16,31	102,47
Kabupaten Samosir		100,00	86,20

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

3.2.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur dan jenis kelamin penduduk merupakan karakteristik penduduk yang pokok, yang mempunyai pengaruh penting terhadap tingkah laku demografi maupun sosial ekonomi di suatu wilayah.

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif ditinjau berdasarkan umur. Penduduk yang tidak produktif adalah gabungan dari penduduk yang berusia muda, yaitu penduduk yang berusia (0-14) tahun dengan penduduk yang berusia lanjut, yaitu penduduk yang berusia 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk produktif adalah penduduk yang berusia (15-64) tahun.

Tabel 3.5
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin 2016

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin (jiwa)		Laki-laki + Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	7 334	7 103	14 437	103,25
5 - 9	7 777	7 433	15 210	104,63
10 - 14	7 712	6 926	14 638	111,35
15 - 19	6 533	5 686	12 219	114,90
20 - 24	3 673	2 523	6 196	145,58
25 - 29	3 649	3 324	6 973	109,78
30 - 34	3 693	3 493	7 186	105,73
35 - 39	3 477	3 274	6 751	106,20
40 - 44	3 365	3 496	6 861	96,26
45 - 49	3 199	3 518	6 717	90,93
50 - 54	2 984	3 779	6 763	78,96
55 - 59	2 881	3 712	6 593	77,61
60 - 64	2 334	3 130	5 464	74,57
65 - 69	1 558	2 145	3 703	72,63
70 - 74	949	1 443	2 392	65,77
75 +	786	1 607	2 393	48,91
Jumlah	61 904	62 592	124 496	98,90

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Samosir pada setiap kelompok umur (0-4) tahun hingga (35-49) tahun adalah lebih besar dari 100 persen, namun pada setiap kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun adalah kurang dari 100 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk laki-laki pada setiap kelompok umur (0-4) tahun hingga (35-49) tahun lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dan pada setiap kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (40-44) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat mortalitas penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh migrasi ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

Berdasarkan struktur umur penduduk di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di daerah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia dibawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), sedangkan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun keatas kurang lebih kurang 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen) dan persentase penduduk 65 tahun ke atas sekitar 15 persen (Mantra, 1985)

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kelompok Umur
2012 - 2016

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 14	42 962	44 382	44 875	44 428	44 285
15 – 64	70 877	70 316	70 318	71 150	69 331
65+	7 774	7 751	7 872	8 211	10 880
Jumlah	121 613	122 449	123 065	123 789	124 496

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu Negara/daerah, apakah tergolong maju atau tidak. Pada umumnya suatu Negara/daerah yang tergolong maju mempunyai angka Rasio Ketergantungan Umur yang lebih kecil dari pada Negara/daerah yang belum maju.

Berdasarkan data pada table 3.6 dapat dihitung Rasio Ketergantungan Umur (RKU) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016, yaitu sebesar 42,39 persen, dimana Rasio Ketergantungan Usia Anak-anak adalah 35,57 persen, dan Rasio Ketergantungan Usia Lanjut adalah 6,82 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut kelompok umur, ternyata penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2016 sebagian besar berada pada kelompok umur produktif (15–64 tahun) yaitu sebanyak 57,61 persen, kemudian disusul

kelompok umur anak-anak (0-14 tahun) yaitu sebesar 35,37 persen. Sedangkan penduduk umur 65 tahun keatas hanya sekitar 6,82 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi dan tantangan ke depan pada era perdagangan bebas dan globalisasi.

Tabel 3.7
 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir
 Menurut Kelompok Umur
 2012 – 2016 (Persen)

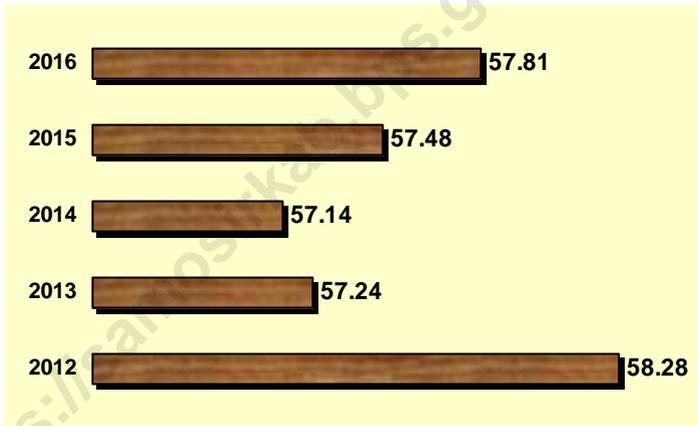
Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 14	35,33	36,40	36,46	35,89	35,37
15 – 64	58,28	57,24	57,14	57,48	57,61
65+	6,39	6,36	6,40	6,63	6,82
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Untuk mengetahui sejauh mana besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif (15 - 64 tahun) terhadap penduduk non produktif, dapat dilihat dari angka rasio beban ketergantungan baik anak-anak (0 - 14 tahun) maupun Lansia (>65 tahun). Dapat dilihat bahwa persentase kelompok usia produktif jauh lebih banyak daripada usia anak-anak dan lansia menurun bila disbanding tahun 2015. Pada tahun 2016,

angka beban ketergantungan sebesar 42,19 persen. Pada Tahun 2014 terjadi kenaikan angka beban ketergantungan menjadi 42,86 persen. Pada Tahun 2015, angka beban ketergantungan menurun menjadi 42,52 persen.

Gambar 3.2
Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Samosir 2012 – 2016 (Persen)



Sumber :BPS Provinsi Sumatera Utara

3.2.3 Pendidikan

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, persentase penduduk Kabupaten Samosir berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah adalah sebanyak 0,01 persen, yang masih sekolah 27,16 persen, dan yang tidak sekolah lagi 72,83 persen.

Diketahui juga bahwa menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak sekolah lagi adalah sebanyak 70,79 persen dari total penduduk laki-laki, sementara penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak sekolah lagi adalah sebanyak 74,85 persen dari total penduduk perempuan.

Tabel 3.8
 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas
 Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin
 2016 (persen)

Partisipasi Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,02	0,00	0,00
2. Masih Sekolah	29,21	25,15	27,157
– SD	0,02	9,64	9,57
– SMTP	10,68	8,79	9,73
– SMTA	7,88	6,06	6,96
– Diploma/Sarjana	1,14	0,66	0,90
3. Tidak Sekolah Lagi	70,77	74,85	72,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016, BPS

Disamping itu, persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah adalah sebesar 29,21 persen

dari total penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah adalah sebesar 25,15 persen dari total penduduk perempuan.

3.3 STRUKTUR EKONOMI

3.3.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan keseluruhan daerah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran besarnya perekonomian makro suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu akibat adanya aktifitas ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 di Kabupaten Samosir mengalami sedikit pelambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen, yang sedikit melambat dari tahun 2015 yaitu sebesar 5,77 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ini juga berada masih dibawah pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang sebesar 5,95 persen.

Tabel 3.9
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan dan Laju
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Samosir (000 rupiah)
2012-2016

Tahun	Harga Berlaku (Miliar Rp)	Harga Konstan (MiliarRp)	LPE (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	18 796	16 435	6,05
2013	20 799	17 314	6,10
2014	23 062	19 235	5,95
2015	25 397	20 226	5,77
2016	27 655	21 171	5,27

Sumber : PDRB Kabupaten Samosir, 2012-2016

Nilai PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2016 adalah mencapai Rp. 3.442.976 juta, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.635.768 juta. Menurut lapangan usaha atau sektor, nilai PDRB sektoral atas dasar harga berlaku yang paling tinggi adalah kategori pertanian, kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp. 1.765.630 juta, diikuti oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 415.423 (juta), sektor perdagangan, reperasi mobil dan sepeda motor Rp. 371.844 juta, kategori bangunan Rp. 357.284 juta, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum Rp. 177.567 juta, kategori transportasi dan pergudangan Rp. 123.523 juta, kategori real estate Rp. 72.560

juta, kategori jasa pendidikan Rp. 31.546 juta dan sektor jasa keuangan dan asuransi Rp. 31.265 juta.

Sementara itu nilai nilai PDRB sektoral atas dasar harga konstan 2010 yang paling tinggi adalah sektor sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp. 1.38.462 (juta), diikuti oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 299.786 juta, kategori perdagangan, reperi mobil dan sepeda motor Rp. 293.781 juta, kategori bangunan Rp. 267.912 juta, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum Rp. 127.683 juta, kategori transportasi dan pergudangan Rp. 79.488 juta, kategori real estate Rp. 54.336 juta, kategori informasi dan komunikasi Rp. 26.618 juta, dan kategori jasa keuangan dan asuransi Rp. 24.183 juta. Hal ini seperti disajikan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10
 Nilai PDRB Kabupaten Samosir Tahun 2016
 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku **)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 **)
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 765 630	1 385 462
2. Pertambangan dan Penggalian	22 120	16 417
3. Industri Pengolahan	18 783	14 278
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1 703	1 942
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1 826	1 303
6. Bangunan	357 284	267 912
7. Perdagangan, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	371 844	293 781
8. Transportasi dan Pergudangan	123 523	79 488
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177 567	127 683
10. Informasi dan Komunikasi	25 870	26 618
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	31 265	24 183
12. Real Estate	72 560	54 336
13. Jasa Perusahaan	3 900	3 005
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	415 423	299 786
15. Jasa Pendidikan	31 546	23 949
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19 572	13 750
17. Jasa Lainnya	2 560	1 825
PDRB	3 442 976	2 635 768

Sumber : Samosir Dalam Angka 2017

**) Angka Sangat Sementara

3.3.2 Struktur Perekonomian Makro

Struktur perekonomian makro suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari daerah tersebut, hingga tahun 2016 struktur perekonomian makro Kabupaten Samosir masih tetap bertumpu pada kategori pertanian kehutanan dan perikanan, hal ini dapat dilihat dari peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2016, yaitu mencapai 51,28 persen.

Peranan kategori yang lain masing-masing adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 12,07 persen, kategori perdagangan, reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,80 persen, kategori bangunan sebesar 10,38 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,16 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 3,59 persen, kategori real estate sebesar 2,11 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 0,92 persen. kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,91 persen.

Berdasarkan peranan masing-masing kategori tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian makro Kabupaten Samosir sebenarnya sangat ditentukan oleh empat kategori yang dominan, yaitu kategori pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial, kategori perdagangan, reperasi mobil dan sepeda motor, dan kategori

bangunan dengan total peranan keempat kategori tersebut mencapai 84,53 persen, sementara total peranan dari kategori-kategori yang lain hanya memberikan peranan sebesar 15,47 persen.

Suatu daerah yang memiliki struktur perekonomian makro dengan peranan kategori pertanian yang cukup besar dan dominan, akan berkembang ke arah yang semakin maju apabila daerah tersebut mampu meningkatkan peranan kategori-kategori non pertanian dari waktu ke waktu, oleh sebab itu daerah ini masih memerlukan upaya-upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian beberapa kategori non pertanian yang lain guna akselerasi kemajuan perekonomian makro daerah Kabupaten Samosir.

3.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kemajuan perekonomian makro suatu wilayah yang menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan sebagai akibat adanya aktifitas pembangunan di berbagai sektor di wilayah tersebut, Laju pertumbuhan ekonomi adalah merupakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010.

Tabel 3.11
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samosir
Tahun 2016 (Persen)

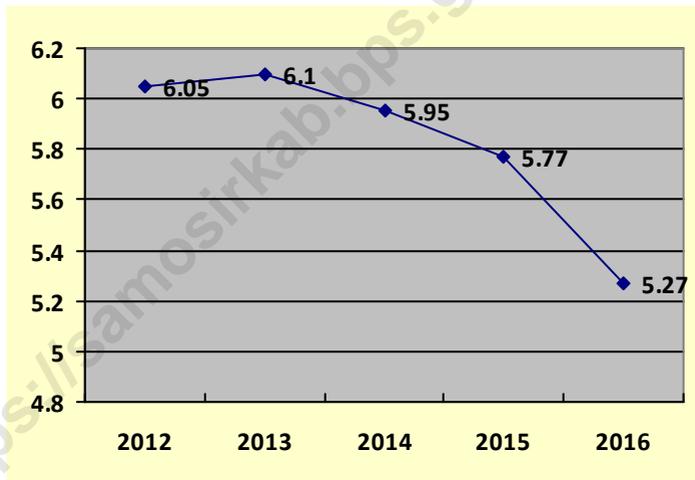
Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku **)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 **)
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51,28	52,56
2. Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,62
3. Industri Pengolahan	0,55	0,54
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,05	0,05
6. Bangunan	10,38	10,16
7. Perdagangan, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	10,80	11,15
8. Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,02
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	4,84
10. Informasi dan Komunikasi	0,75	1,01
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,92
12. Real Estate	2,11	2,06
13. Jasa Perusahaan	0,11	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	12,07	11,37
15. Jasa Pendidikan	0,92	0,91
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,52
17. Jasa Lainnya	0,07	0,07
PDRB	100,00	100,00

Sumber : Samosir Dalam Angka 2017

**) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dari tahun 2010 – 2016 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2012 sebesar 6,05 persen, tahun 2013 sebesar 6,10 persen, tahun 2014 sebesar 5,95 persen, pada tahun 2015 sebesar 5,77 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir
2012 – 2016, (persen)



Sumber : Samosir Dalam Angka 2017

**⁾ Angka Sangat Sementara, *⁾ Angka Sementara

Tahun 2015 hingga tahun 2016 seluruh kategori ekonomi di Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan positif yang bervariasi. Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2016 adalah kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 4,80 persen, kategori jasa lainnya 3,42 persen, diikuti

oleh skategori jasa pendidikan yaitu mencapai 2,85 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 2,65 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 6,97 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 2,26 persen, kategori reperasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,98 persen, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar (min)-1,68 persen, serta sektor idustri pengelolaan sebesar (min) -4,16 persen.

3.4 Kesejahteraan Rakyat

3.4.1 PDRB Per Kapita

Seiring dengan kondisi perekonomian makro Kabupaten Samosir yang relatif semakin baik akibat adanya laju pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahun, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Samosir yang diukur dengan menggunakan PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan 2010 juga semakin meningkat. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku selama tahun 2012 – 2016 setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp. 18,80 juta per tahun pada tahun 2012 menjadi Rp. 20,80 juta per tahun pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 23,06 juta per tahun sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp. 25,40 juta per tahun dan sebesar Rp. 27,65 juta per tahun. Demikian juga PDRB per kapita atas dasar

harga konstan 2010 yang merupakan pendapatan per kapita riil, dimana pengaruh kenaikan harga (inflasi) telah diabaikan, juga mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp. 17,31 juta pada tahun 2012, sebesar Rp. 18,324 juta per tahun pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 19,23 juta per tahun. PDRB per kapita ADHK 2010 pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,22 juta per tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 21,17 juta.

Perlu dijelaskan bahwa angka PDRB per kapita suatu wilayah, sesungguhnya bukanlah merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing setiap penduduk, namun angka ini merupakan ukuran rata-rata yang digunakan untuk mengetahui gambaran rata-rata tingkat pendapatan per kapita secara regional.

Tabel 3.12
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Samsir Menurut Sektor
2012-2016, (persen)

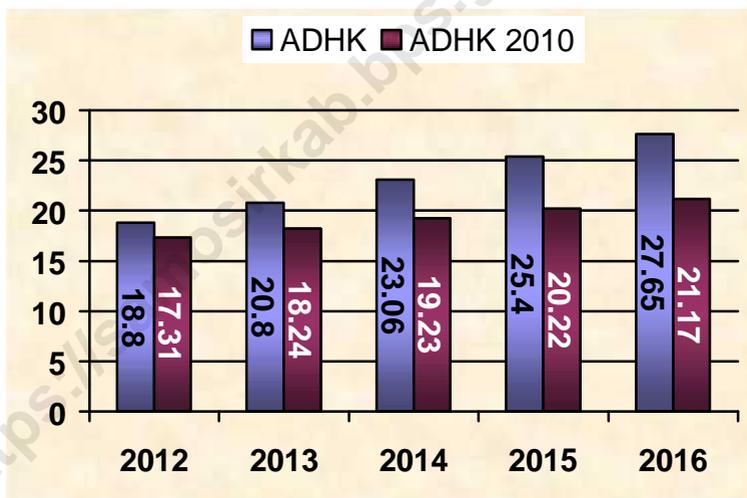
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,65	6,12	5,82	5,28	4,98
2. Pertambangan dan Penggalian	7,51	7,55	7,15	7,09	7,00
3. Industri Pengolahan	4,15	3,06	3,16	3,81	2,65
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7,58	8,11	8,25	8,59	2,30
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	6,80	4,90	5,24	5,52	5,70
6. Bangunan	5,93	5,12	5,09	5,87	6,92
7. Perdagangan, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	2,01	6,52	6,15	6,49	6,91
8. Transportasi dan Pergudangan	6,17	6,70	6,62	7,79	7,81
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43	7,40	7,12	7,32	7,90
10. Informasi dan Komunikasi	8,42	8,91	7,58	5,53	7,61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,99	7,95	4,62	4,54	4,74
12. Real Estate	6,29	5,33	4,39	4,58	5,60
13. Jasa Perusahaan	4,48	3,94	4,08	3,55	5,24
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,89	5,69	6,97	6,64	1,70
15. Jasa Pendidikan	4,96	4,69	4,76	7,28	6,00
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	4,73	5,11	0,76	5,60
17. Jasa Lainnya	2,95	3,26	4,41	3,54	6,47
PDRB	6,05	6,08	5,95	5,77	5,27

: Dalam Angka 2017

***) Angka Sangat Sementara, *) Angka Sementara

Untuk mengetahui apakah peningkatan pendapatan ini telah dinikmati secara merata oleh penduduk Kabupaten Samsir, dapat diketahui dari distribusi pendapatan penduduk sebagaimana akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Gambar 3.4
Perkembangan PDRB Per Kapita Penduduk
Terhadap ADHK Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Samsir 2012 – 2016



Sumber : Samsir Dalam Angka 2017

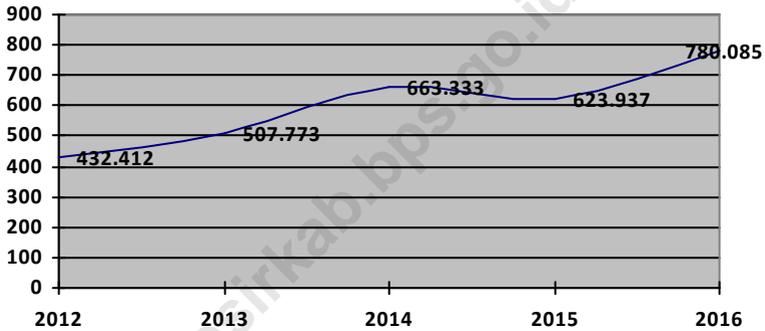
**) Angka Sangat Sementara, *) Angka Sementara

3.4.2 Pengeluaran Per Kapita dan Pola Konsumsi

Selain ukuran PDRB per kapita, gambaran peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dapat juga dilihat melalui pendekatan rata-rata nilai pengeluaran per kapita

maupun struktur pengeluaran konsumsi per kapita yang digunakan, baik untuk konsumsi makanan maupun untuk konsumsi bukan makanan (pola konsumsi).

Gambar 3.5
Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rp)
Penduduk Kabupaten Samosir 2012- 2016



Sumber : Susenas, 2012-2016

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi makanan dan bukan makanan selama tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 432.412,- per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp. 780.085,- per bulan pada tahun 2016.

Namun bila dibandingkan tahun 2014, Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2014 mengalami penurunan, yaitu dari Rp. 663.333,- per

bulan menjadi Rp. 623.937,- per bulan pada tahun 2015. Penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan ini disebabkan karena menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, baik untuk konsumsi makanan maupun untuk non makanan.

Tabel 3.13
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan 2012 – 2016

Tahun	Makanan		Bukan Makana		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	292 700	67,69	139 713	32,31	432 412	100,00
2013	316 947	62,42	190 825	37,58	507 773	100,00
2014	401 553	60,54	261 780	39,46	663 333	100,00
2015	403 900	64,73	220 038	35,27	623 937	100,00
2016	479 816	61,51	300 269	38,49	785 085	100,00

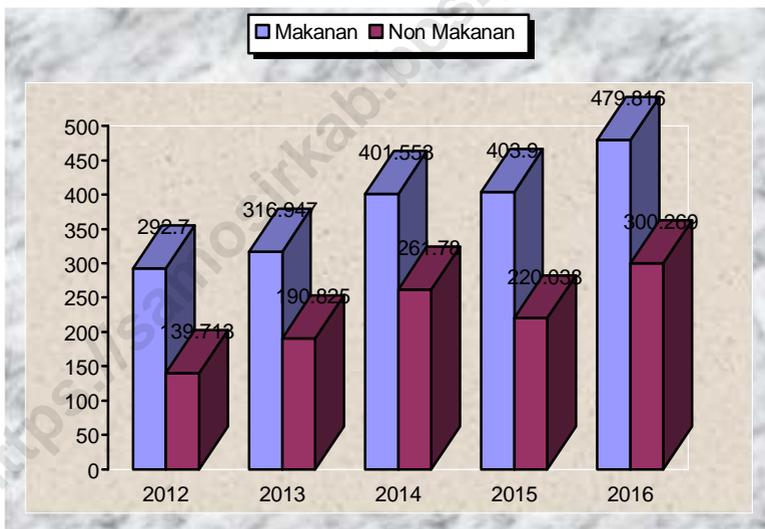
Sumber : Susenas, 2012-2016

Laju pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir selama tahun 2012-2016 adalah rata-rata sebesar 16,15 persen per tahun.

Hingga tahun 2016 proporsi rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi makanan adalah lebih besar dari pada konsumsi untuk bukan makanan, hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2016 pola konsumsi

penduduk Kabupaten Samosir masih memprioritaskan kebutuhan pokok makanan dari pada kebutuhan bukan makanan. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 proporsi Pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016 untuk konsumsi makanan dan bukan makanan adalah meningkat.

Gambar 3.6
 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
 Untuk Makanan Dan Bukan Makanan 2012– 2016



Sumber : Susenas 2012 – 2016

Proporsi rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi makanan pada tahun 2012 sebesar 67,69 dengan nilai Rp. 292.700,- tahun 2013 adalah sebesar 62,42 persen dengan nilai Rp. 316.947,- sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 60,54 dengan nilai

Rp. 401.553,-, tahun 2015 adalah sebesar 64,73 persen dengan nilai Rp.403.900,- sedangkan pada tahun 2016 ada sebesar 61,51 dengan nilai Rp.479.816,- dan rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir untuk konsumsi non makanan pada tahun 2012 sebesar 32,31 persen dengan nilai Rp. 139.713,- tahun 2013 adalah sebesar 37,58 persen dengan nilai Rp. 190.825,-, tahun 2014 adalah sebesar 39,46 persen dengan nilai Rp.261.780,- tahun 2015 adalah sebesar 35,27 persen dengan nilai Rp. 220.038,-sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar 38,49 persen dengan nilai Rp. 300.269,-.

Perubahan pola pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan setiap tahun dapat menunjukkan perubahan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk, Pada umumnya, proporsi rata-rata pengeluaran per kapita untuk bukan makanan termasuk aneka barang dan jasa, seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, dan sejenisnya, yang relatif lebih besar dari pada proporsi rata-rata pengeluaran untuk makanan dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik, sebaliknya proporsi rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan yang relatif lebih besar dari pada proporsi Pengeluaran rata-rata untuk bukan makanan dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk yang relatif belum baik.

Sementara itu, persentase penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan

dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Menurut
Golongan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2015 – 2016

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah)	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Kurang dari 200.000	0,51	0,00
200.000 - 299.999	3,29	0,75
300.000 - 499.999	46,79	22,87
500.000 - 749.999	27,97	40,48
750.000 - 999.999	11,06	14,63
1.000.000 - 1.249.999	5,48	11,45
1.250.000 - 1.499.999	1,84	4,21
Lebih dari 1.500.000	3,07	5,62
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2015-2016

Pada tahun 2016 persentase penduduk Kabupaten Samosir yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih dari Rp. 500.000,- s/d Rp.749.000,- adalah yang paling besar, yaitu 40,48 persen, diikuti oleh mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 499.999 sebesar 22,87 persen, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp.750.000,- s/d Rp. 999.999,- sebesar 14,63 persen, antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.249.999,- sebesar

11,45 persen, dan yang paling sedikit adalah mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita sebulan antara Rp.200.000,- s/d Rp.299.999, yaitu sebesar 0,75 persen.

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, persentase penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2016 yang memiliki golongan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan < Rp. 200.000,-, antara Rp.200.000,- s/d Rp.299.999,-, antara Rp.300.000,- s/d Rp.499.999,- adalah berkurang, sedangkan persentase penduduk yang memiliki golongan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan antara Rp.500.000,- s/d Rp. 749.999,-, antara Rp.750.000,- s/d Rp.999.999,-, antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.249.999,-, antara Rp.1.250.000,- s/d Rp.1.49.999,-, dan lebih dari Rp.1.500.000,- adalah meningkat.

3.4.3 Tingkat Kemiskinan

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami penurunan, yaitu dari 18,30 ribu orang menjadi 17,20 ribu dengan batas garis kemiskinan Rp.240.310,- per kapita per bulan menjadi Rp.228.767,- per kapita per bulan. Dan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu dari 14,11 ribu orang menjadi 14,40 ribu orang dengan batas garis kemiskinan Rp.242.263,- per kapita per bulan, menjadi Rp.271.619,- per kapita per bulan.

Pertambahan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir tahun 2016 ini, diakibatkan yang terutama adalah akibat musim kemarau yang berkepanjangan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, sehingga masyarakat tidak bisa mengolah lahan pertanian sebab pendapatan utama masyarakat Kabupaten Samosir adalah pertanian dan penurunan jatah beras rastra termasuk salah satunya.

Tabel 3.15
Perkembangan Indikator Kemiskinan
Kabupaten Samosir 2012 - 2016

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	P ₀	P ₁	P ₂
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	240 310	18,30	15,16	1,86	0,37
2013	228 767	17,20	14,01	1,14	0,16
2014	235 355	16,27	13,20	1,84	0,40
2015	242 263	17,64	14,11	1,48	0,30
2016	271 619	18,01	14,40	2,12	0,44

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.15 menunjukkan bahwa, sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, garis kemiskinan di Kabupaten Samosir meningkat, dan jumlah persentase penduduk miskin juga meningkat, hal ini disebabkan karena harga-harga kebutuhan

dasar di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 hingga 2016 semakin meningkat, namun tingkat pendapatan penduduk tidak mengikuti peningkatan kenaikan harga-harga tersebut.

Disamping itu berbagai program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan khususnya dalam upaya mengurangi beban hidup penduduk miskin, seperti Program Beras Raskin (Raskin), Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai program yang lain, juga memberikan dampak positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Samosir hingga tahun 2016.

Tabel 3.15 juga memperlihatkan beberapa indikator lain yang mengindikasikan tentang kemiskinan di Kabupaten Samosir yang relatif semakin menurun hingga tahun 2016, diantaranya adalah rata-rata kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1). Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Samosir sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 cenderung semakin besar hingga menjadi 2,12, demikian juga dengan Intensitas Kemiskinan yang ditunjukkan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), yaitu ketimpangan Pengeluaran rata-rata di antara penduduk miskin, yaitu 0,44 pada tahun 2016.

BAB 4

DISTRIBUSI PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN SAMOSIR

<https://samosir.kab.bps.go.id>

BAB IV

DISTRIBUSI PENDAPATAN

4.1 TINGKAT PENDAPATAN

Tingkat kesejahteraan rumah tangga/penduduk disuatu wilayah, dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Sementara itu, tingkat pendapatan dari rumah tangga/penduduk di daerah tersebut, dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Tingkat pendapatan dari rumah tangga/penduduk tersebut dilihat dari perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah. Perkembangan PDRB tersebut terkadang tidak mencerminkan keadaan perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga/penduduk yang sebenarnya disuatu wilayah.

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas), yang dilakukan di suatu wilayah. Pada bab ini akan dibahas perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga/penduduk dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menelaah data hasil Susenas.

Berdasarkan hasil Susenas 2016 seperti pada Tabel 4.1 persentase penduduk menurut golongan pengeluaran di Kabupaten Samosir adalah golongan pengeluaran <200.000 rupiah yaitu sebesar 0,00 persen. Kemudian disusul pada golongan pengeluaran antara 200.000-299.999 rupiah sebesar 0,75 persen, golongan pengeluaran antara 300.000-499.999 rupiah sebesar 22,87 persen, golongan pengeluaran antara 500.000-749.999 rupiah sebesar 40,48 persen, golongan pengeluaran 750.000-999.999 rupiah sebesar 14,63 persen. Selebihnya 21,28 persen golongan pengeluaran diatas satu juta rupiah. Dengan demikian penduduk Kabupaten Samosir didominasi oleh pengeluaran 500.000-749.999 rupiah per kapita per bulan.

Tabel 4.1
 Persentase Penduduk dan Persentase Pengeluaran
 Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
 Kabupaten Samosir 2016 (Persen)

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk	Persentase Pengeluaran
(1)	(2)	(3)
<200.000	0,00	0,00
200.000 – 299.999	0,75	0,27
300.000 – 499.999	22,87	11,96
500.000 – 749.999	40,48	32,05
750.000 – 999.999	14,63	15,83
1.000.000 – 1.249.999	11,45	16,09
1.250.000 – 1.499.999	4,21	7,24
>1.500.000	5,62	16,56
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016, BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Susenas 2016 diperoleh juga informasi bahwa persentase pengeluaran terbesar menurut golongan pengeluaran adalah 500.000-749.999 dengan pengeluaran sebesar 32,05 persen disusul golongan pengeluaran perkapita perbulan 1.500.00 rupiah keatas sekitar 16,56 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Golongan pengeluaran terbesar didominasi oleh golongan yang mempunyai pengeluaran

menengah (500.000-749.999 rupiah). Kondisi ini mengalami pergeseran jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015) yang didominasi oleh golongan yang sama.

Tabel 4.2
 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
 Menurut Jenis Konsumsi Kabupaten Samosir
 dan Provinsi Sumatera Utara
 2016 (Persen)

Kabupaten/Provinsi	Makanan (%)	Non Makanan (%)	Jumlah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Samosir	61,51	38,49	100,00
Sumatera Utara	55,31	44,69	100,00

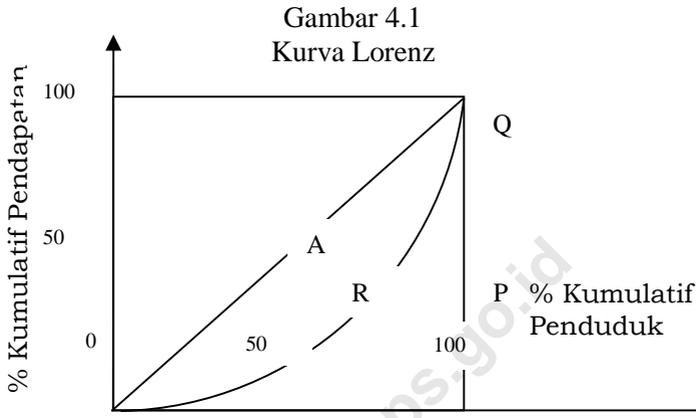
Sumber :Susenas 2013, BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir adalah sebesar 780.085 rupiah, dimana untuk makanan sebesar 479.816 rupiah atau 61,51persen dan non makanan sebesar 300.269 rupiah atau 38,49 persen. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara yaitu sebesar 853.756 rupiah, yang terdiri pengeluaran untuk makanan 472.219 rupiah dan non makanan sebesar 381.537 rupiah.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Samosir masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir yang lebih rendah dibandingkan pengeluaran per kapita per bulan Sumatera Utara.

Masalah ketimpangan pendapatan tersebut akan terus berlangsung jika tidak ada usaha yang secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan mereka yang berada pada posisi kurang beruntung. Karena pada umumnya mereka yang berada pada lapisan atas biasanya akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan akan memperoleh balas jasa yang lebih besar daripada penduduk yang lebih miskin.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan, beberapa ukuran dan metode telah dikembangkan oleh beberapa penelitian dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sungguh pun demikian, salah satu ukuran yang paling sering digunakan adalah ***Gini Ratio***. Disamping penghitungannya relatif mudah, ketimpangan pendapatan yang diperoleh melalui kedua ukuran tersebut juga bisa digambarkan secara visual dengan menggunakan *Kurva Lorenz*, seperti contoh berikut ini.



Melalui *Kurva Lorenz* dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh setiap golongan penduduk pada suatu daerah penelitian.

Menurut Hera Susanti dkk, dalam buku Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI,1995, koefisien gini Kabupaten Samosir tahun 2016 ini mempunyai arti bahwa ketimpangan pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah rendah/relatif merata (Gini Rasio < 0.4), demikian juga menurut Michael P. Todaro - Buhanuddin Abdullah, dalam buku Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, edisi ketiga jilid 1, Erlangga.

Pada Grafik 4.1. dapat dilihat, apabila kurva ORQ semakin mendekati garis diagonal OQ menandakan tingkat

ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan apabila semakin menjauhi garis diagonal (mendekati OPQ) menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Luas daerah OPQ menunjukkan tingkat ketimpangan yang sempurna. Secara teoritis, perhitungan angka *Gini Ratio* dengan menggunakan angka pendapatan akan memberikan hasil yang lebih baik, karena bisa memberikan informasi tentang kondisi pembagian pendapatan yang sebenarnya. Tetapi karena data pendapatan sukar diperoleh, maka biasanya digunakan data pengeluaran sebagai *proksi* atau pendekatan terhadap data pendapatan.

Angka *Gini Ratio* yang diperoleh dengan menggunakan data pengeluaran cenderung “*under estimate*” karena pengeluaran konsumsi bagi penduduk kaya biasanya lebih rendah dari pada pendapatannya (ada tabungan). Sebaliknya bagi penduduk miskin pengeluarannya bisa sama atau lebih besar dari pendapatannya, karena ada pinjaman, mengambil tabungan, menjual aset atau menerima kiriman dari pihak lain. Masalah yang perlu diperhatikan pada perhitungan *Gini Ratio* adalah berapa angka *Gini Ratio* yang dapat diterima dari dan berapa yang sudah menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius. Karena tidak ada standar yang pasti, maka analisa hanya bisa dilakukan dengan cara membandingkan angka *Gini Ratio* antar daerah atau antar waktu, apakah *Gini Ratio* semakin kecil, yang berarti

distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya. Sungguh pun demikian, banyak pendapatan yang mengatakan bahwa angka *Gini Ratio* sekitar 0,30 menunjukkan distribusi pendapatan yang cukup merata sedangkan angka *Gini Ratio* sekitar 0,50 atau lebih berarti tingkat ketimpangan pembagian pendapatan cukup serius.

Table 4.3
Angka Gini Ratio Kabupaten Samosir
2012-2016 (Persen)

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Samosir	0,30	0,33	0,31	0,28	0,27

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Berdasarkan hasil penghitungan data Susenas 2016 diperoleh hasil bahwa besarnya angka *Gini Ratio* Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah sebesar 0,27. Dengan angka *Gini Ratio* sebesar 0,27 maka sesuai dengan penjelasan pada bagian sebelumnya bahwa dengan besarnya *Gini Ratio* kurang dari 0,30 dapat dikatakan bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Samosir cukup merata. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kesenjangan jangan sampai terlalu besar, sehingga pendapatan rumah tangga/penduduk tidak timpang ataupun mengalami kesenjangan.

4.2. Ukuran Gini Ratio

Berdasarkan perhitungan koefisien Gini (*Gini Ratio*) terhadap distribusi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016 menurut golongan pengeluaran sebagai pendekatan (proxy) rata-rata pendapatan per kapita per bulan, diperoleh koefisien Gini Kabupaten Samosir tahun 2016 adalah sebesar 0,27, seperti dalam table 4.4.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 Gini Ratio Kabupaten Samosir adalah berada dibawah 0,40 atau terletak diantara 0,27 dan 0,33 yang mempunyai arti bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2012 hingga 2016 adalah rendah atau relatif merata, atau dengan pengertian lain bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Samosir menurut berbagai kelompok pendapatan adalah relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam.

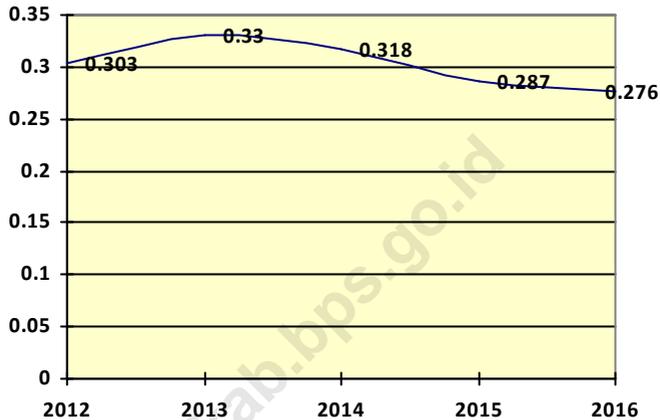
Tabel 4.4
Gini Ratio dan Kriteria Ketimpangan Kabupaten Samosir
2012-2016

Tahun	Gini Ratio	Kriteria Ketimpangan
(1)	(2)	(3)
2012	0,30	Sedang/Relatif Merata
2013	0,33	Rendah/Relatif Merata
2014	0,31	Rendah/Relatif Merata
2015	0,28	Rendah/Relatif Merata
2016	0,27	Rendah/Relatif Merata

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Namun pada tahun 2016 *Gini Ratio* Kabupaten Samosir menurun menjadi 0,27 dengan kategori rendah/relatif merata, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 0,33 tahun 2014 sebesar 0,31 dan tahun 2015 sebesar 0,28 atau dengan kata lain bahwa distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Samosir menurut berbagai kelompok pendapatan pada tahun 2014 adalah relatif semakin merata dibandingkan dengan selama tahun 2013, 2014 dan 2015.

Gambar 4.2
Pekembangan Gini Ratio Kabupaten Samosir
2012 - 2016



Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Perlu diingat bahwa ukuran ini adalah bersifat relatif dan hanya berlaku dalam distribusi pendapatan/pengeluaran antar golongan penduduk di Kabupaten Samosir, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan ukuran tingkat kesejahteraan yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan wilayah/daerah lain yang memiliki PDRB per Kapita per tahun atas dasar berlaku dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari Kabupaten Samosir, walaupun memiliki angka Gini Ratio yang sama. Artinya, walaupun PDRB per Kapita atas dasar berlaku Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 27,65 juta juta per tahun dengan rata-rata pengeluaran

penduduk mencapai Rp. 780.085,- per kapita per bulan, namun tingkat kesejahteraan penduduknya belum tentu sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah lain, sekalipun daerah tersebut memiliki angka Gini Ratio yang sama dengan Kabupaten Samosir.

4.3 Analisis Kriteria Bank Dunia

Berdasarkan data persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan dan persentase pengeluaran per kapita per bulan penduduk menurut golongan pengeluaran, dapat diketahui besarnya proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok desil penduduk menurut kelompok penerima pendapatan. Dengan menggunakan Kriteria Bank Dunia, dimana kelompok penduduk penerima pendapatan dibagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok penduduk 40% berpendapatan rendah (Miskin), kelompok penduduk 40% berpendapatan menengah, dan kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi (Terkaya). Di Kabupaten Samosir diketahui bahwa pada tahun 2016 proporsi jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% berpendapatan terbawah (Miskin) sebesar 23,37 persen, 40% kelompok berpendapatan menengah adalah 37,75 persen, dan oleh kelompok 20 % berpendapatan tinggi (Kaya) adalah 38,40 persen, seperti ditunjukkan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Proporsi Pendapatan yang Diterima oleh Kelompok
Penduduk Penerima Pendapatan Di Kabupaten Samosir
2014 - 2016

Tahun	Kelompok Penduduk Penerima Pendapatan			Kategori Ketimpangan
	40 % Rendah	40 % Menengah	20 % Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	22,25	35,70	42,04	Rendah
2015	23,33	37,37	39,30	Rendah
2016	23,85	37,75	38,40	Rendah

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Hal ini menunjukkan bahwa kategori ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016, bahkan sejak tahun 2014 adalah rendah, karena sejak tahun 2014 hingga 2016 proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah (Miskin) terhadap total pendapatan seluruh penduduk adalah lebih besar dari 17 persen.

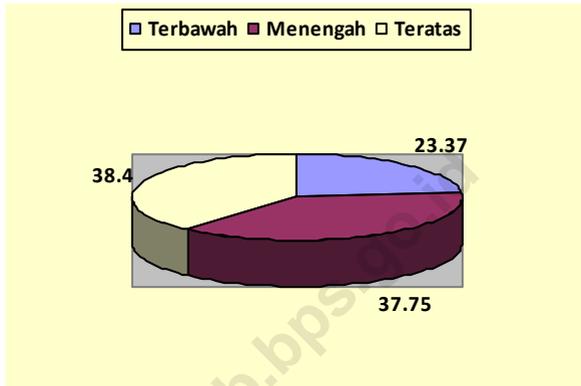
Namun demikian, sejak tahun 2014 hingga 2016 persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok berpendapatan rendah adalah cenderung semakin kecil, sementara persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok berpendapatan Menengah cenderung semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan

penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2014 hingga 2016 cenderung semakin kurang merata.

Meningkatnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 % kelompok berpendapatan Menengah pada tahun 2016 ini mengakibatkan berkurangnya persentase pendapatan yang dinikmati, baik oleh penerima pendapatan kelompok 20 % berpendapatan tinggi (Terkaya), maupun oleh penerima pendapatan kelompok 40 % berpendapatan rendah (Miskin), bahkan pengurangan persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 % berpendapatan rendah (Miskin) pada tahun 2016.

Sejalan dengan Kuznet's, kondisi distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir yang cenderung semakin kurang merata ini perlu diantisipasi ke depan agar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 % berpendapatan rendah (Miskin), khususnya kelompok 20 % berpendapatan terendah (Termiskin) tidak semakin berkurang setiap tahun.

Gambar 4.3
Persentase Pendapatan Yang Diterima Menurut
Kelompok Penduduk Di Kabupaten Samosir 2016



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Untuk mengatasi kecenderungan ketidak merataan pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir ini, pemerintah perlu melakukan upaya melalui strategi dan kebijakan pembangunan ke depan sehingga hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan pendapatan khususnya bagi 40% kelompok berpendapatan terendah (Termiskin), dan pada akhirnya diharapkan proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk tidak semakin berkurang hingga mencapai antara 12 sampai dengan 17 persen (ketimpangan sedang/menengah) atau kurang dari 12 persen (ketimpangan tinggi).

Biasanya penyebab ketidak merataan dalam distribusi pendapatan adalah akibat ketidakmertaan dalam kepemilikan kekayaan, ketidak mertaan dalam upah tenaga kerja (*Labour Income*) yang biasanya akibat rendahnya kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, terbatasnya bidang pekerjaan, dan factor-faktor lainnya, seperti lingkungan, gizi buruk, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

Untuk melihat tingkat ketidakmerataan penerima pendapatan dalam distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Samosir antara dua kelompok secara ekstrim, yaitu kelompok yang miskin dengan kelompok yang kaya dapat dilihat dari nisbah (rasio) antara pendapatan yang diterima oleh 40 % kelompok Rendah dengan 20 % kelompok tinggi.

BAB 5

PENUTUP

<https://samosir.kab.bps.go.id>

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Samsir dapat dikatakan masih cukup rendah bila dibandingkan dengan Sumatera Utara, hal ini disebabkan karena jarak tempuh Kabupaten Samsir ke Kota Medan, sebagai pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Utara, relatif cukup jauh.
2. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Samsir Tahun 2016 sebesar 14,40 persen masih lebih tinggi jika dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,35 persen.
3. Gini Rasio adalah merupakan ukuran Indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk yang umum digunakan hingga saat ini dalam evaluasi keberhasilan maupun perencanaan pembangunan, disamping ukuran pertumbuhan pendapatan penduduk ataupun ukuran-ukuran lainnya, dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 3.442.976 (juta), dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.635.768 (juta) dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan PDRB terbesar yaitu Rp. 1.765.630 (juta) pada PDRB ADHB dan sebesar Rp. 1.385.462 (juta) pada PDRB ADHK 2010. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,27 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,77 persen.

5. Peningkatan nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB perkapita penduduk tahun 2016 sudah mencerminkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk secara signifikan dilihat dari tingkat pengeluaran rata-rata perkapita penduduk sebulan, dimana rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2015 adalah Rp. 623.937,- per bulan dan pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 780.085,- per bulan. Pada umumnya

semakin tinggi pendapatan penduduk maka tingkat pengeluaran rata-rata penduduk pun akan semakin tinggi.

6. Kenaikan tingkat pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Samosir sebulan tahun 2016 disebabkan karena meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan makanan, yaitu dari Rp. 479.816,- dengan proporsi 61,51 persen pada tahun 2015 menjadi Rp. 403.900,- dengan proporsi 64,73 persen dan untuk kebutuhan non makanan dari Rp. 220.038,- dengan proporsi 35,27 persen pada tahun 2016 menjadi Rp. 300.269,- dengan proporsi 38,49 persen pada tahun 2016. Pada umumnya tingkat kesejahteraan yang cenderung semakin tinggi, ditandai dengan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan yang cenderung semakin kecil dan untuk bukan makanan yang semakin besar.

7. Selama tahun 2013 hingga 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir, dibarengi oleh distribusi pendapatan penduduk yang relatif merata, atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk yang rendah, hal ini ditunjukkan oleh angka Gini Rasio Kabupaten Samosir tahun 2016 yang relatif kecil, yaitu antara 0,33 hingga 0,27, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk tahun 2016 yakni

rendah/relatif merata dibandingkan dengan tahun 2015 lebih pada kriteria rendah/relatif merata.

8. Untuk menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat yang adil ekonomi sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah hendak lebih banyak mengarahkan strategi dan program pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh kelompok 11,40 persen berpendapatan sangat rendah (termiskin) ini, atau kelompok 40 persen berpendapatan rendah.

9. Berbagai program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan pada lima tahun terakhir 2012 - 2016, seperti Program Beras Sejahtra (Rastra), Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang lain, masih diperlukan untuk mengurangi beban hidup atau meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi kelompok 40 persen berpendapatan Rendah (Miskin).

5.2. SARAN

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Samosir beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, karena jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk justru akan menjadi beban yang harus ditanggung.
2. Pemerataan pendapatan di Kabupaten Samosir cukup merata, namun masih banyak penduduk Kabupaten Samosir yang berpendapatan rendah, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian serius untuk terus meningkatkan pendapatan penduduk dengan tidak melupakan azas pemerataan agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Sebab jika kondisi ketidak merataan terus dibiarkan akan menjadi masalah bagi proses pembangunan berkelanjutan.

<https://samosirkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1
 Produk Domestik Regional Bruto Samosir Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha
 2012- 2016
 (juta rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industrial Original</i>	Tahun/ <i>Year</i>				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 195 194	1 325 774	1 466 700	1 621 875	1 765 630
2. Pertambangan & Penggalian	14 019	15 996	17 443	19 436	22 120
3. Industri Pengolahan	14 078	15 004	16 246	17 810	18 783
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1 433	1 517	1 484	1 640	1 826
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1 172	1 303	1 455	1 303	1 455
6. Bangunan	240 232	269 639	289 775	326 561	357 284
7. Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	252 358	279 358	305 590	335 612	371 844
8. Transportasi dan Pergudangan	69 232	80 874	93 368	108 327	123 523
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106 216	119 876	136 466	155 859	177 567
10. Informasi dan Komunikasi	19 951	21 033	22 444	23 844	25 870
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	21 297	24 133	26 447	28 856	31 265
12. Real Estate	48 047	54 310	59 341	65 035	72 560
13. Jasa Perusahaan	2 762	2 976	3 222	3 502	3 900
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	264 922	296 099	339 272	386 235	415 423
15. Jasa Pendidikan	21 040	22 575	25 303	27 894	31 546
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	12 254	13 658	15 346	17 235	19 572
17. Jasa Lainnya	1 685	1 845	2 046	2 254	2 560
PDRB	2 285 890	2 545 976	2 821 948	3 143 844	3 442 976

Sumber : Samosir Dalam Angka 2017

Lampiran 2
 Produk Domestik Regional Bruto Samosir ADHK 2010 Menurut
 Lapangan Usaha
 2012- 2016
 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun/Year				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 116 215	1 184 480	1 253 460	1 319 686	1 385 462
2. Pertambangan & Penggalian	12 432	13 371	14 327	15 343	16 417
3.Industri Pengolahan	12 602	12 988	13 398	13 909	14 278
4.Pengadaan Listrik dan Gas	1 458	1 576	1 706	1 898	1 942
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	1 058	1 110	1 168	1 232	1 303
6. Bangunan	214 260	225 221	236 683	250 565	267 912
7.Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	228 225	243 094	258 051	274 792	293 781
8. Transportasi dan Pergudangan	60 126	64 154	68 401	73 729	79 488
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95 846	102 937	110 265	118 340	127 683
10. Informasi dan Komunikasi	20 004	21 786	23 438	24 735	26 618
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	19 556	21 110	22 086	23 089	24 183
12. Real Estate	44 747	47 132	49 203	51 455	54 336
13. Jasa Perusahaan	2 591	2 693	2 803	2 902	3 055
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	244 506	258 427	276 431	294 775	299 786
15. Jasa Pendidikan	19 202	20 104	21 061	22 594	23 949
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	11 286	11 820	12 424	13 021	13 750
17. Jasa Lainnya <i>Other Service Activities</i>	1 534	1 586	1 656	1 714	1 825
PDRB	2 105 648	2 233 588	2 366 561	2 503 779	2 635 788

Catatan : **) Angka Sangat Sementara

*) Angka Sementara

Sumber : Samsir Dalam Angka 2017

Lampiran 3

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Samsir
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
2012 – 2016
(rupiah)

Tahun/Year	Atas Dasar Harga Berlaku (000 rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (000 rupiah)	
	Samosir	Sumatera Utara	Samosir	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	18 796	31 109	17 314	28 037
2013	20 792	34 600	18 241	29 343
2014	22 931	38 046	19 230	30 483
2015	25 397	41 020	20 226	31 637
2016	27 655	44 558	21 172	32 885

Sumber : BPS Kabupaten Samsir
BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 4

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Samosir (000 jiwa)	%	Sumatera Utara (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	18,30	15,16	1 378,40	10,41
2013	17,20	14,01	1 416,40	10,39
2014	16,27	13,20	1 360,60	9,85
2015	17,64	14,11	1 463,67	10,53
2016	18,01	14,40	1 455,95	10,35

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 5
 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
 dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2016
 (persen)

KABUPATEN/KOTA	GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN								JUMLAH
	Kurang dari 200.000	200.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 749.999	750.000- 999.999	1.000.000- 1.249.999	1.250.000- 1.499.999	1.500.00 0 Keatas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. NIAS	7,32	27,29	47,62	12,83	2,40	1,23	0,47	0,85	100,00
02. MANDAILING NATAL		2,46	23,94	37,61	17,78	9,37	4,55	4,29	100,00
03. TAPANULI SELATAN		0,22	27,44	40,81	16,65	7,63	2,42	4,83	100,00
04. TAPANULI TENGAH	0,05	1,03	43,79	25,13	14,80	6,67	3,34	5,18	100,00
05. TAPANULI UTARA	0,30	3,59	34,92	32,13	11,33	7,92	4,87	4,92	100,00
06. TOBA SAMOSIR		0,67	17,29	30,96	21,58	14,77	4,72	10,02	100,00
07. LABUHANBATU		0,95	22,03	31,47	22,04	9,72	5,00	8,79	100,00
08. ASAHAN		2,87	25,40	33,33	21,08	8,29	4,52	4,51	100,00
09. SIMALUNGUN		2,12	26,97	37,77	16,68	7,75	3,43	5,28	100,00
10. DAIRI	0,38	0,93	25,72	36,57	14,71	9,74	4,87	7,07	100,00
11. KARO		0,36	14,94	29,97	23,16	11,08	6,65	13,84	100,00
12. DELI SERDANG		1,46	21,63	26,00	27,46	10,99	6,60	5,86	100,00
13. LANGKAT		2,87	26,91	36,96	18,86	6,23	3,22	4,92	100,00
14. NIAS SELATAN	3,15	19,07	52,89	20,74	3,11	0,66	0,31	0,07	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN		2,87	30,35	36,77	13,09	9,51	2,79	4,61	100,00
16. PAKPAK BHARAT		3,14	30,09	37,15	15,58	6,77	4,62	2,65	100,00
17. SAMOSIR		0,75	22,87	40,48	14,63	11,45	4,21	5,62	100,00
18. SERDANG BEDAGAI		3,16	21,22	35,69	22,15	9,24	4,29	4,25	100,00
19. BATU BARA		0,63	16,14	32,93	23,92	13,72	6,81	5,87	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA		2,19	18,34	38,21	20,27	12,57	4,20	4,23	100,00
21. PADANG LAWAS		3,97	26,90	30,83	16,86	9,36	4,26	7,81	100,00
22. LABUHANBATU SELATAN		0,62	8,75	37,02	27,73	13,01	5,73	7,14	100,00
23. LABUHANBATU UTARA		1,08	20,32	39,20	20,04	11,50	4,39	3,48	100,00
24. NIAS UTARA	4,40	22,85	46,13	17,24	4,82	2,75	1,03	0,78	100,00
25. NIAS BARAT	5,22	17,97	46,38	21,68	4,09	2,73	0,48	1,44	100,00
71. SIBOLGA		3,04	17,84	24,46	23,75	10,99	8,01	11,92	100,00
72. TANJUNGBALAI	0,50	4,90	30,99	21,36	16,46	9,46	5,64	10,67	100,00
73. PEMATANGSIANTAR		0,76	15,15	24,07	24,15	14,09	6,90	14,89	100,00
74. TEBING TINGGI		3,13	25,99	23,51	22,37	8,11	6,27	10,63	100,00
75. MEDAN		1,24	11,97	17,56	25,85	14,10	12,54	16,74	100,00
76. BINJAI		2,19	13,38	27,52	26,02	11,56	7,64	11,69	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN		1,70	22,36	19,86	21,70	11,15	8,92	14,30	100,00
78. GUNUNGSITOLI	1,18	13,12	36,91	24,05	9,22	5,60	3,62	6,30	100,00
SUMATERA UTARA	0,25	2,85	22,92	29,12	20,92	10,04	6,02	7,88	100,00
- Perkotaan	0,02	2,66	20,40	21,23	24,58	11,30	8,18	11,64	100,00
- Perdesaan	0,48	3,04	25,48	37,14	17,20	8,76	3,84	4,06	100,00

Sumber : Susenas 2016,
 BPS Provinsi Sumatera
 Utara

Lampiran 6

Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2016 (persen)

GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN										
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH									
	Kurang dari 200.000	200.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 749.999	750.000- 999.999	1.000.000- 1.249.999	1.250.000- 1.499.999	1.500.000 Keatas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01. NIAS	3,32	17,07	43,82	18,82	5,10	3,34	1,57	6,97	100,00	
02. MANDAILING NATAL	,	0,87	13,17	30,71	20,31	13,77	8,17	13,00	100,00	
03. TAPANULI SELATAN	,	0,06	15,07	34,12	19,19	11,38	4,42	15,76	100,00	
04. TAPANULI TENGAH	0,01	0,38	25,16	22,32	17,75	10,52	6,50	17,36	100,00	
05. TAPANULI UTARA	0,08	1,38	19,46	27,96	13,17	12,23	9,22	16,50	100,00	
06. TOBA SAMOSIR	,	0,20	7,68	20,82	20,28	17,61	6,83	26,59	100,00	
07. LABUHANBATU	,	0,28	10,63	22,45	21,98	12,31	8,10	24,25	100,00	
08. ASAHAN	,	0,95	13,99	26,82	23,65	11,71	7,98	14,90	100,00	
09. SIMALUNGUN	,	0,70	14,74	30,44	18,62	11,22	6,09	18,20	100,00	
10. DAIRI	0,09	0,33	12,99	28,71	15,96	13,37	8,24	20,31	100,00	
11. KARO	,	0,09	6,11	18,80	19,67	12,14	9,00	34,20	100,00	
12. DELI SERDANG	,	0,44	10,53	19,38	27,99	14,32	10,48	16,86	100,00	
13. LANGKAT	,	1,05	15,02	30,97	21,39	9,15	5,95	16,47	100,00	
14. NIAS SELATAN	1,37	11,40	48,20	29,57	6,34	1,67	1,05	0,40	100,00	
15. HUMBANG HASUNDUTAN	,	0,98	17,51	32,16	15,53	14,71	5,28	13,83	100,00	
16. PAKPAK BHARAT	,	1,21	17,82	32,92	18,54	10,81	9,13	9,57	100,00	
17. SAMOSIR	,	0,27	11,96	32,05	15,83	16,09	7,24	16,56	100,00	
18. SERDANG BEDAGAI	,	1,05	11,74	29,55	24,77	13,28	7,70	11,90	100,00	
19. BATU BARA	,	0,20	7,89	23,91	23,47	17,13	10,70	16,70	100,00	
20. PADANG LAWAS UTARA	,	0,75	9,86	30,33	21,95	17,65	7,36	12,11	100,00	
21. PADANG LAWAS	,	1,37	13,51	23,79	17,64	12,67	7,02	24,00	100,00	
22. LABUHANBATU SELATAN	,	0,19	4,30	26,68	26,05	15,76	8,64	18,38	100,00	
23. LABUHANBATU UTARA	,	0,40	10,56	31,82	22,29	16,01	7,78	11,14	100,00	
24. NIAS UTARA	1,76	13,24	39,57	23,01	9,23	6,63	3,11	3,46	100,00	
25. NIAS BARAT	2,07	9,40	37,51	27,72	7,41	6,17	1,34	8,38	100,00	
71. SIBOLGA	,	0,77	7,85	15,52	20,54	12,35	10,84	32,13	100,00	
72. TANJUNGBALAI	0,11	1,42	14,88	15,36	15,83	11,59	8,63	32,18	100,00	
73. PEMATANGSIANTAR	,	0,19	6,37	14,96	19,78	14,79	9,06	34,84	100,00	
74. TEBING TINGGI	,	0,90	11,71	16,44	20,93	9,61	9,22	31,20	100,00	
75. MEDAN	,	0,27	4,40	9,90	19,36	13,34	14,90	37,84	100,00	
76. BINJAI	,	0,54	5,81	18,00	22,51	12,68	10,36	30,10	100,00	
77. PADANGSIDIMPUAN	,	0,45	9,43	13,03	18,91	12,42	12,36	33,39	100,00	
78. GUNUNGSITOLI	0,34	5,15	21,59	22,62	12,07	9,29	7,21	21,72	100,00	
SUMATERA UTARA	0,05	0,86	11,04	21,42	21,03	12,90	9,62	23,08	100,00	
- Perkotaan	0,00	0,70	8,84	14,05	21,95	12,80	11,50	30,16	100,00	
- Perdesaan	0,12	1,06	13,98	31,22	19,80	13,03	7,11	13,67	100,00	

Sumber : Susenas 2016, BPS
Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 7
Pengeluaran Rata-Rata /Kapita/Bulan dan Persentase Rata-Rata
Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Konsumsi 2016 (Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN/KAPITA/BULAN			% PENGELUARAN/KAPITA/BULAN		
	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. NIAS	252 902	145 822	398 724	63,43	36,57	100,00
02. MANDAILING NATAL	474 005	272 942	746 948	63,46	36,54	100,00
03. TAPANULI SELATAN	472 928	269 862	742 791	63,67	36,33	100,00
04. TAPANULI TENGAH	424 227	276 426	700 654	60,55	39,45	100,00
05. TAPANULI UTARA	454 654	260 362	715 016	63,59	36,41	100,00
06. TOBA SAMOSIR	578 218	348 434	926 652	62,40	37,60	100,00
07. LABUHANBATU	483 584	376 952	860 536	56,20	43,80	100,00
08. ASAHAN	435 005	334 695	769 700	56,52	43,48	100,00
09. SIMALUNGUN	438 026	329 137	767 163	57,10	42,90	100,00
10. DAIRI	513 744	288 433	802 177	64,04	35,96	100,00
11. KARO	617 920	388 489	1 006 410	61,40	38,60	100,00
12. DELI SERDANG	466 946	382 790	849 736	54,95	45,05	100,00
13. LANGKAT	430 742	309 438	740 181	58,19	41,81	100,00
14. NIAS SELATAN	262 883	155 733	418 616	62,80	37,20	100,00
15. HUMBANG HASUNDUTAN	425 510	277 923	703 433	60,49	39,51	100,00
16. PAKPAK BHARAT	424 746	274 064	698 810	60,78	39,22	100,00
17. SAMOSIR	479 816	300 269	780 085	61,51	38,49	100,00
18. SERDANG BEDAGAI	459 307	303 569	762 875	60,21	39,79	100,00
19. BATU BARA	499 696	365 302	864 998	57,77	42,23	100,00
20. PADANG LAWAS UTARA	490 008	296 274	786 281	62,32	37,68	100,00
21. PADANG LAWAS	457 459	351 904	809 363	56,52	43,48	100,00
22. LABUHANBATU SELATAN	516 750	381 070	897 819	57,56	42,44	100,00
23. LABUHANBATU UTARA	462 303	314 265	776 569	59,53	40,47	100,00
24. NIAS UTARA	291 289	156 508	447 797	65,05	34,95	100,00
25. NIAS BARAT	303 298	169 365	472 663	64,17	35,83	100,00
71. SIBOLGA	528 607	465 904	994 511	53,15	46,85	100,00
72. TANJUNGBALAI	510 606	379 599	890 206	57,36	42,64	100,00
73. PEMATANGSIANTAR	515 458	531 902	1 047 360	49,21	50,79	100,00
74. TEBING TINGGI	488 972	431 774	920 746	53,11	46,89	100,00
75. MEDAN	532 642	623 106	1 155 748	46,09	53,91	100,00
76. BINJAI	506 866	489 976	996 842	50,85	49,15	100,00
77. PADANGSIDIMPUAN	526 287	460 190	986 478	53,35	46,65	100,00
78. GUNUNGSITOLI	366 740	299 599	666 339	55,04	44,96	100,00
SUMATERA UTARA	472 219	381 537	853 756	55,31	44,69	100,00
- Perkotaan	493 142	474 404	967 546	50,97	49,03	100,00
- Perdesaan	450 979	287 255	738 234	61,09	38,91	100,00

Sumber : Susenas 2016, BPS
Provinsi Sumatera Utara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://samosirkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMOSIR
Komplek Perkantoran Kabupaten Samsir Blok A
Desa Siopat Sosor Parbaba Pangururan 22392
Tlp. 0626-2222490 Fax: 0626-2222491
email : bps1217@bps.go.id Website : samosirkab.bps.go.id

